

PERUBAHAN PILIHAN MASYARAKAT PADA PEMILIHAN UMUM

Oleh:
Asriadi AR
STISIP Muhammadiyah Sinjai

Abstrak

Pemilihan umum dalam beberapa hal menghasilkan perubahan, termasuk perubahan pilihan politik masyarakat. Adanya perubahan sikap masyarakat dalam menentukan pilihan politik pada pemilihan umum merupakan bagian dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti, supaya diperoleh jawaban yang akurat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada Pemilu umum.

Penulisan ini termasuk penulisan dengan kajian kepustakaan. Penulis berusaha mencari teori-teori yang berkaitan dengan persoalan yang diangkat dalam berbagai literature atau referensi yang ditemukan penulis.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan pilihan masyarakat pada pemilihan umum mengalami tingkat perbedaan tergantung pada individu dan kelompok yang melakukan perubahan terhadap pilihan politiknya tersebut. Namun secara umum masyarakat mengubah pilihan politiknya secara linear pada partai-partai yang memiliki kesamaan asas.

Setelah mempelajari berbagai literature atau referensi, agar penyelenggaraan Pemilu dapat berjalan demokratis, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Masyarakat pilih dalam menentukan pilihan politik sebaiknya didasarkan pada hatinuraninya. Partai politik peserta Pemilu diharapkan dapat mencermati faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan pilihan politik masyarakat pilih sebagai bahan koreksi dan pengalaman. Demikian pemerintah hendaknya memberikan sanksi yang tegas terhadap kecurangan dalam Pemilu.

Kata Kunci: Perubahan Pilihan Masyarakat dan Pemilihan Umum

PENDAHULUAN

Pemilihan umum memiliki makna yang sangat strategis bagi perjalanan bangsa Indonesia. Pada satu sisi, pemilihan umum dari periode ke periode diharapkan lebih baik dari pada pemilihan umum sebelumnya, dengan memperbaiki sistem dan aturan pelaksanaan. Baik sistem, maupun aturan pelaksanaannya merupakan perubahan atau penyempurnaan untuk menjawab berbagai kekurangan dan kelemahan sebelumnya.

Pemilihan calon anggota legislatif, Presiden, dan Wakil Presiden secara langsung merupakan fenomena politik. Reaksi publik atas fenomena itu layak untuk dikaji dan disikapi secara bijak, karena Pemilu dalam beberapa hal mampu menghasilkan perubahan. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada system atau aturan pelaksanaannya. Adanya kecenderungan masyarakat dalam menentukan pilihan mengalami perubahan. Artinya terjadi perubahan atau perpindahan simpatisan partai tertentu kepada partai lainnya. Hal ini dapat diketahui dari jumlah perbandingan perolehan suara untuk tiap-tiap partai politik peserta Pemilu ke Pemilu. Adanya perubahan sikap masyarakat dalam partisipasi politik pada Pemilu legislatif merupakan bagian dan fenomena yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

Berbagai pokok permasalahan yang muncul di atas, agar penulisan ini dapat lebih terfokus, maka penulis melakukan pembatasan masalah mengenai Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada pemilihan umum. Tujuan penulisan ini adalah : Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pilihan masyarakat pada pemilihan umum

Penulisan ini berguna sebagai Bahan masukan bagi penulis dalam mendapatkan pengetahuan mengenai pemilihan umum pada umumnya dan masalah partisipasi

politik masyarakat pada khususnya serta dapat dimanfaatkan untuk pengembangan wawasan politik dan hukum.

PEMBAHASAN

Perilaku Pemilih

Pemilihan umum berfungsi sebagai prosedur untuk memberikan legitimasi atau pengabsahan dalam penugasan seseorang pada jabatan tertentu didalam jabatan politis pemerintahan. Aspek penting yang lain pada Pemilu adalah perilaku individu dalam pemilihan umum tersebut.

Newman (dalam Nursal 2004:126) mengelompokkan pemilih menjadi empat segmen berdasarkan perilaku:

1. Segmen pemilih rasional: kelompok pemilih yang memfokuskan perhatian pada faktor isu dan kebijakan kontestan dalam menentukan pilihannya
2. Segmen pemilih emosional: Kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh perasaan-perasaan tertentu seperti kesedihan, kekhawatiran dan kegembiraan terhadap harapan tertentu dalam menentukan pilihan politiknya
3. Segmen pemilih sosial: kelompok yang mengasosiasikan kontestan pemilu dengan kelompok-kelompok sosial tertentu dalam menentukan pilihan politiknya
4. Segmen pemilih situasional: kelompok pemilih yang dipengaruhi oleh faktor-faktor situasional tertentu dalam menentukan pilihannya. Segmen ini digerakkan oleh perubahan dan akan menggeser pilihan politiknya jika terjadi kondisi-kondisi tertentu.

Kotler, Peter dan Olson (dalam Nursal 2004:234) mengemukakan beberapa tahap respon pemilih terhadap kontestan Pemilu sebagai berikut:

1. *Awareness*, yakni bila seseorang dapat mengingat atau menyadari bahwa sebuah pihak tertentu merupakan sebuah kontestan Pemilu.
 2. *Knowledge*, yakni ketika seorang pemilih mengetahui beberapa unsur penting mengenai produk kontestan tersebut, baik substansi maupun presentasi. Unsur-unsur itu diinterpretasikan sehingga membentuk makna politis tertentu dalam pikiran pemilih.
 3. *Liking*, yakni tahap dimana seseorang pemilih menyukai kontestan tertentu karena satu atau lebih makna politis yang terbentuk di pikirannya sesuai dengan aspirasinya.
 4. *Preference*, yakni tahap dimana pemilih menganggap bahwa satu atau beberapa makna politis yang terbentuk sebagai interpretasi terhadap produk politik sebuah kontestan Pemilu tidak dapat di hasilkan secara lebih memuaskan oleh kontestan lainnya.
 5. *Conviction*, yakni tahap dimana pemilih tersebut sampai pada keyakinan untuk memilih kontestan Pemilu.
- Isu-isu dan kebijakan politik sangat menentukan perilaku pemilih. Sekelompok bisa saja memilih sebuah partai atau kandidat politik karena dianggap sebagai representasi dari agama atau keyakinannya. Tetapi kelompok yang lainnya memilih karena partai atau kandidat tertentu dianggap representasi dari kelas sosialnya. Ada juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada partai atau figur tokoh tertentu (Nursal 2004:53)

Nursal (2004:72) menyimpulkan beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku pemilih:

1. *Social Imagery* atau Citra Sosial (Pengelompokan Sosial) *Social imagery* adalah citra kandidat atau partai dalam pikiran pemilih mengenai “berada” di dalam kelompok sosial mana atau tergolong sebagai apa sebuah partai atau kandidat politik.
2. Identifikasi Partai Identifikasi partai yakni proses panjang sosialisasi kemudian membentuk ikatan yang kuat dengan partai politik atau organisasi kemasyarakatan yang lainnya. Dengan identifikasi partai, seolah-olah semua pemilih relatif mempunyai pilihan yang tetap. Dari Pemilu ke Pemilu, seseorang selalu memilih partai atau kandidat yang sama.
3. *Emotional Feelings* (Perasaan Emosional) *Emotional feeling* adalah dimensi emosional yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang ditunjukkan oleh *policy* politik yang ditawarkan.
4. *Candidate Personality* (Citra Kandidat) *Candidat personality* mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat. Beberapa sifat yang merupakan *Candidate personality* adalah artikulatif, welas asih, stabil, energik, jujur, tegar, dan sebagainya.
5. *Issues and Policies* (Isu dan Kebijakan Politik) Komponen *issues and policies* mempresentasikan kebijakan atau program yang di janjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang Pemilu. Platform dasar yang sering ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada para pemilih adalah kebijakan ekonomi, kebijakan luar negeri, kebijakan dalam negeri, kebijakan sosial, kebijakan politik dan keamanan, kebijakan hukum, dan karakteristik kepemimpinan.
6. *Current Events* (Peristiwa Mutakhir) *Current events* mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye. *Current events* meliputi masalah domestik dan masalah luar negeri. Yang termasuk masalah domestik misalnya tingkat inflasi, prediksi ekonomi, gerakan separatis, ancaman keamanan, merajalelanya korupsi, dan sebagainya. Yang termasuk masalah luar negeri misalnya perang antar negara-negara tetangga, invasi ke sebuah negara, dan sebagainya yang mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung kepada para pemilih.
7. *Personal Events* (Peristiwa Personal) *Personal events* mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh pada perjuangan tertentu, ikut berperang mempertahankan tanah air, dan sebagainya.
8. *Epistemic Issues* (Faktor-faktor Epistemik) *Epistemic issues* adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keinginan para pemilih mengenai hal-hal baru. *Epistemic issues* sangat mungkin muncul di tengah-tengah ketidakpercayaan publik kepada institusi-institusi politik yang menjadi bagian dari sistem yang berjalan

Perubahan hak politik pemilih dalam memilih

Perubahan hak politik pemilih dalam memilih terjadi secara kontinu di dalam setiap masyarakat. Ini berkaitan erat dengan perubahan kondisi internal dan eksternal sebagai dampak dari sifat dan interaksi antar kelompok sosial yang ada, pergantian aktor politik dan kepemimpinan suatu masyarakat, dan surutnya generasi tua dan munculnya generasi muda ke pentas politik. Perubahan-perubahan politik yang cukup berarti dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut, munculnya pemimpin yang kharismatik, adanya gerakan-gerakan kultural dan intelektual, dan pasang surutnya kelompok-kelompok sosial tertentu, termasuk para elite yang memiliki kepentingan social yang berbeda. Namun umumnya diakui bahwa perubahan politik yang disebabkan oleh faktor ekonomi adalah sangat penting. Dewasa ini tampak jelas bahwa pengaruh ekonomi dan teknologi terhadap kehidupan politik terjadi melalui aksi-aksi kelompok-kelompok sosial tertentu. Perubahan politik dapat terjadi secara rutin maupun non rutin (*disruptif*). Mengenai tipe atau pola perubahan hak politik pemilih dalam memilih itu sendiri dapat dirinci sebagai berikut:

1. Perubahan yang terjadi secara gradual dan perubahan secara mendadak Perubahan politik yang terjadi secara gradual dilembagakan dalam persaingan diantara partai-partai politik dan dalam berbagai gerakan sosial serta kelompok kepentingan yang menentang pemerintah.
2. Perubahan besar dan perubahan kecil Menurut Tom Bottomore (dalam Maran 2001:132) ciri-ciri perubahan besar antara lain:

- (1) Perubahan yang mengakibatkan terjadinya reorganisasi penting di dalam aparat pemerintahan dan hubungan antara pemerintah dan rakyat.
- (2) Perubahan yang menyebabkan terjadinya restrukturalisasi hubungan-hubungan sosial lainnya, termasuk modifikasi dalam pengaturan hierarki berbagai kelompok sosial yang ada.
- (3) Perubahan yang terjadi dengan kekerasan dan perubahan yang terjadi dengan damai. Konflik dan kekerasan seringkali menandai perubahan besar dalam kehidupan politik. Revolusi dan perang melahirkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan dari sistem politik Orde Lama ke sistem politik Orde Baru dan dari sistem politik Orde Baru ke sistem politik Orde Reformasi, kedua perubahan politik tersebut disertai dengan konflik dan kekerasan yang memakan korban jiwa sangat besar.

Untuk mengetahui pola perubahan pilihan politik suatu masyarakat dapat dilihat dari tipe kebudayaan politik masyarakat tersebut. Menurut Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo 1995:36) kebudayaan politik suatu bangsa diartikan sebagai distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik diantara masyarakat bangsa itu. Kebudayaan politik dapat juga diartikan sebagai pola tingkah laku individu yang berkaitan dengan kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik.

Menurut Sastroatmodjo (1995:37) dengan memahami kebudayaan politik, paling tidak dapat diperoleh dua manfaat yaitu:

1. Sikap-sikap warga negara terhadap sistem politik akan mempengaruhi tuntutan-tuntutan, respon-responnya, dukungannya, dan orientasinya terhadap sistem politik tertentu.
2. Dengan memahami hubungan antara kebudayaan politik dengan system politik, maksud-maksud individu melakukan kegiatannya dalam sistem politik atau faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pergeseran politik dapat dimengerti.

Persepsi dan budaya politik yang telah ada dan melekat dalam masyarakat turut mempengaruhi jalannya proses sosialisasi dan turut menentukan peran dalam proses perubahan pilihan politik. Almond dan Verba (dalam Sastroatmodjo 1995:47) membuat klasifikasi tipe-tipe budaya politik. Secara garis besar kebudayaan politik dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1. Budaya Politik Parokial

Masyarakat secara umum tidak menaruh minat yang begitu besar terhadap objek politik yang luas, tetapi hanya dalam batas tertentu, yakni keterikatan pada objek yang relatif sempit seperti keterikatan pada agama/ religi. Parokialisme dalam sistem politik yang diferensiatif lebih bersifat afektif dan orientatif dari pada kognitifnya.

2. Budaya Politik Subjek

Masyarakat menyadari adanya otoritas pemerintah. Secara umum masyarakat menerima segala keputusan yang diambil dan segala kebijakan pejabat yang berwenang dalam masyarakat. Bagi mereka yang prinsip adalah mematuhi perintah pemerintah,

menerima, loyal dan setia terhadap anjuran, perintah, serta kebijaksanaan pemimpinnya. Dalam budaya politik subjek, orientasi dalam system politik lebih bersifat normatif dan afektif daripada kognitif.

3. Budaya Politik Partisipan

Masyarakat memiliki orientasi politik yang secara eksplisit ditujukan kepada sistem secara keseluruhan, bahkan terhadap stuktur, proses dan administratif. Masyarakat memiliki kesadaran terhadap hak serta tanggung jawabnya. Masyarakat juga merealisasi dan mempergunakan hak-hak politiknya. Masyarakat dalam budaya politik partisipan tidaklah menerima begitu saja keputusan politik, sebab masyarakat sadar, meskipun kecil mereka tetap memiliki arti bagi berlangsungnya sistem politik. Tingkah laku warga negara dalam budaya politik partisipan menggunakan pertimbangan rasional dan tidak sekedar emosional dalam menentukan pilihan atau mengambil kebijaksanaan. Di dalam kehidupan tidak semua norma berubah serentak, tetapi sesuai dengan sifat manusia, selalu ada kebutuhan manusia yang tidak berubah. Disamping itu terdapat beberapa perubahan yang berlangsung lebih cepat dari pada yang lain, juga ada beberapa kelompok yang lebih mudah menyesuaikan diri daripada kelompok yang lain.

Sorokin (dalam Astrid, 1999:172) melihat perubahan masyarakat dari segi psikologik yaitu bahwa perubahan terjadi karena:

1. *Ideational change* (perubahan idea)
2. *Sensational change* (pengaruh materi terhadap mental manusia)
3. *Idealistic change* (perubahan ideologi)

Manusia bersedia untuk mengadakan perubahan sikap (*attitude change*) jika dorongan dan kebutuhan “abadi” dapat dipenuhi. Begitu juga masyarakat, dalam perubahan masyarakat terutama dalam arti perubahan yang kumulatif (*cumulatif change*), pada umumnya orang berusaha mengira-ngira arah perkembangan, meskipun usaha ini hanya merupakan spekulasi. Sehubungan dengan arah perubahan (*direction of change*) dapat dibuat tentang pola perubahan. Pola perubahan suatu masyarakat, menurut Moore secara umum sebagai berikut:

1. Perubahan Linear Perubahan ini bersifat sederhana. Dalam teori ini ada anggapan bahwa perubahan akan selalu kembali ke fase sebelumnya. Biasanya berlangsung dengan lambat dan dalam jangka pendek terdapat kecenderungan sebagai perubahan menurut garis lurus atau menurut siklus dengan meningkat, sedangkan dalam jangka panjang dapat berbentuk spiral yaitu kembali dalam tingkat keadaan yang sama tetapi lebih tinggi dan mempunyai efek yang lebih luas. Moore (dalam Soekanto, 2001:339)
2. Perubahan Non linear Perubahan non linear mewujudkan pertumbuhan dan kebhinekaan. Perubahan ini berbentuk perubahan yang bercabang dengan tendensi menaik. Perubahan Perubahan Waktu radikal berlangsung dalam jangka waktu yang relatif cepat. Namun bagaimana dahsyatnya perubahan tergantung

dari lingkungan dan manusianya sendiri. Moore (dalam Seokanto, 2001:340)

Gerakan Reformasi pada tahun 1998 mengantarkan perilaku komunikasi interpersonal jauh lebih bebas dibandingkan sebelumnya. Perubahan lingkungan politik tersebut mengubah pengetahuan, keyakinan, dan pemaknaan para pemilih terhadap partai politik. Perubahan ini bermuara pada pembentukan pola sikap dan perilaku baru terhadap partai-partai politik. Namun tingkat perubahan itu berbeda tergantung pada individu dan kelompok yang menghadapi perubahan lingkungan politik itu. Perilaku pemilih di Indonesia, antara lain:

1. Orientasi Agama
Faktor agama tidak dapat diabaikan dalam memetakan perilaku pemilih. Pemilih yang muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya pemilih yang non-muslim cenderung memilih partai non-Islam.
2. Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya
Karakteristik sosial dan pengelompokan sosial yang meliputi usia, jenis kelamin, pekerjaan, latar belakang keluarga, aspek geografis, faktor kelas atau status ekonomi, kegiatan-kegiatan dalam kelompok formal dan informal dan lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.
3. Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan
Baik pemimpin formal maupun pemimpin informal, memiliki kekuatan yang dapat menggerakkan masyarakat mencapai tujuan tertentu termasuk mempengaruhi perilaku pemilih. (Nursal 2004:91) melaporkan para ulama terutama yang kharismatis, diperebutkan oleh partai politik. Hal itu dilakukan sebagai strategi untuk merebut simpati para pemilih yang mayoritas beragama Islam. Model Sosiologi dari mazhab Columbia sebagaimana ditegaskan oleh Lipset menyatakan bahwa perilaku dalam pemilu sebenarnya merupakan ekspresi perjuangan kelas yang ada, baik kelas bawah, kelas menengah maupun kelas atas. Ini sesuai dengan konsep Karl. D. Jackson tentang wewenang tradisional (Kepemimpinan tradisional).
4. Faktor Identifikasi
Para pemilih di Indonesia menunjukkan kecenderungan memiliki kesamaan pilihan partai politik antara orang tua dan anak. Selain itu juga ada kecenderungan bahwa partai yang dipilih sama dengan partai yang dikagumi. Model Sosio-psikologis dari Mazhab Michigan dalam menentukan pilihannya dalam suatu proses pemilihan umum lebih banyak dipengaruhi oleh kekuatan psikologi yang berkembang dalam dirinya oleh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sendiri, sebagai akibat dari proses sosialisasi politik. Seperti sekolah, keluarga, lingkungan pekerjaan, media massa, teman bergaul dan juga kontak-kontak politik langsung dengan tokoh-tokoh politik dan pemerintahan. Akan memainkan peranan dalam membentuk sikap dan keyakinan politik seseorang. Melalui proses sosialisasi politik inilah berkembang ikatan yang bersifat psikologis antara individu dengan suatu partai atau OPP, yang berwujud simpati terhadap OPP yang bersangkutan. Ikatan psikologi inilah yang dikenal

dengan istilah identifikasi kepartaian menunjuk pada perasaan individu terhadap partai di mana ikatan ini juga merupakan ikatan psikologi walaupun tanpa harus menjadi anggota resmi partai tersebut bahkan tanpa satu konsistensi mendukung partai tersebut secara resmi.

5. Orientasi Isu
Tingkat pendidikan yang tinggi akan meningkatkan daya kritis masyarakat terhadap isu dan program yang ditawarkan oleh kontestan Pemilu kepada masyarakat.
6. Orientasi Kandidat
Pengaruh orientasi kandidat terhadap pola perilaku pilihan politik tidak tampak pada Pemilu-Pemilu zaman Orde Baru. Dengan sistem Pemilu yang memilih partai, umumnya para pemilih tidak memperhatikan kandidat saat melakukan pencoblosan. Sebab penetapan kandidat merupakan kebijakan pusat yang seringkali tidak memperhatikan aspirasi daerah. Sebagian besar pemilih tidak mengetahui siapa yang akan mewakili mereka di parlemen setelah hasil Pemilu diketahui. Pada Pemilu legislatif 2004 dengan system pemilihan tanda gambar partai dan nama kandidat, faktor kandidat legislatif memberi pengaruh besar terhadap perilaku pemilih.
7. Kaitan dengan Peristiwa
Faktor penting lain yang mempengaruhi pilihan masyarakat Indonesia adalah kaitan isu dan kandidat yang diajukan, dengan peristiwa-peristiwa yang masih mempengaruhi pikiran para pemilih. Tekanan politis terhadap tokoh-tokoh dan partai tertentu pada masa silam dapat membentuk simpati sebagian pemilih. Penderitaan terhadap ketidakadilan rezim otoriter pada masa lampau dapat menjadi simbol penderitaan sebagian pemilih, sehingga pemilih itu akan mengidentifikasikan dirinya dengan tokoh-tokoh atau organisasi yang menjadi korban (Nursal 2004:98).
8. Rekonfigurasi Papan Catur Politik
Sebuah partai atau kandidat tertentu biasanya memiliki satu atau beberapa kelompok massa andalan (basis massa). Kelompok ini merupakan tambang emas perolehan suara, karena kelompok tersebut mempunyai preferensi kuat dan selalu memilih partainya. Effendy (dalam Nursal 2004:100) menyebutkan di negara-negara yang sedang berkembang basis massa tidak bersifat statis, tetapi fluktuatif. Hal itu sangat berkaitan dengan kesediaan dan kemampuan partai untuk mempertahankan dan memperluas basis pendukungnya.

Partisipasi politik merupakan aspek yang erat kaitannya dengan Negara atau tatanan Negara demokrasi. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga Negara mempengaruhi keputusan pemerintah secara langsung ataupun tidak langsung, seleksi pejabat-pejabat Negara dimana hal ini mempengaruhi kehidupan bangsa.

Pemberian suara merupakan wujud hak politik bagi pemilih yang merupakan aktifitas dari pemilih. Sedangkan pemilu umum (Pemilu) merupakan wahana bagi warga negara untuk menggunakan hak politiknya untuk memilih orang yang dianggapnya layak sebagai wakil yang akan duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), maupun sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Hak memberikan suara atau memilih (right

to vote) merupakan hak dasar (basic right) setiap individu/warga negara yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Perilaku pemilih pada penggunaan hak politik untuk memilih dapat disebabkan oleh Identifikasi kepartaian yakni penggunaan hak politik untuk memilih karena mengikuti keluarga, kepemimpinan *informal* yakni penggunaan hak politik untuk memilih karena mengikuti pemimpin *informal* yang dihormati masyarakat, Isu dan kebijakan politik yakni penggunaan hak politik untuk memilih karena Program dan janji yang ditawarkan oleh OPP serta karena orientasi kandidat yakni penggunaan hak politik untuk memilih karena mengenal dan mengetahui calon legislative.

PENUTUP

Kesimpulan

Perilaku pemilih dalam menentukan pilihan pada pemilihan umum bisa mengalami perubahan karena antara lain: (1) Orientasi Agama (2) Faktor Kelas Sosial dan Kelompok Sosial Lainnya (3) Faktor Kepemimpinan dan Ketokohan (4) Faktor Identifikasi (5) Orientasi Isu (6) Orientasi Kandidat (7) Kaitan dengan Peristiwa (8) Rekonfigurasi Papan Catur Politik

Persepsi dan budaya politik yang telah ada dan melekat dalam masyarakat turut mempengaruhi jalannya proses sosialisasi dan turut menentukan peran dalam proses perubahan pilihan politik. Secara garis besar kebudayaan politik di Indonesia dibedakan menjadi tiga, yaitu: (1) Budaya Politik Parokial (2) Budaya Politik Subjek (3) Budaya Politik Partisipan

Saran

Berdasarkan hasil pembacaan oleh penulis dan kesimpulan, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut: (1) Perlu ada upaya peningkatan pendidikan politik dan pendidikan hukum tentang penggunaan hak pilih bagi pemilih yang sadar dan rasional dalam melalui sosialisasi pemilu (2) Perlu ada upaya peningkatan kualitas calon yang diusung oleh organisasi peserta pemilu melalui pola rekrutmen yang baik oleh partai politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia,
- Budiyanto. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Tata Negara*. Jakarta: Erlangga
- Hutington, Samuel P., dan Nelson, Joan. 1994. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*, Terjemahan Drs. Simamora, Jakarta: Rineka Cipta
- Kweit, Grisez, Mary, and Kweit, Robert W., 1986. *Konsep dan Metode Analisa Politik*, terjemahan Drs. Ratnawati, Jakarta: Bina Aksara
- Legowo, TA dan Sebastian Salang, 2008, *Panduan Menjadi Calon Anggota DPR/DPD/DPRD Menghadapi Pemilu*. Jakarta: Forum Sahabat
- Muhadjir, Noeng, 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. P.O. Box. 8

- Mas'ood, Mohtar dan Mac Adreus, 1995. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nursal, Adman. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu Sebuah Pendekatan Baru Kampanye Pemilihan DPR, DPD, Presiden*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rauf, Maswadi. 1991. *Ciri-ciri Teori Pembangunan Politik, Kasus Partisipasi Politik*. dalam Jurnal Ilmu Politik 9. Jakarta: PT Gramedia
- Riduwan, 2004, *Belajar Muda Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*, Bandung, Alfabeta
- Rush, Michael dan Althof, Philip. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali
- Sanit, Arbi, 1985. *Perwakilan Politik di Indonesia*. Jakarta: Rajawali
- , 1985. *Swadaya Politik Masyarakat*., Jakarta: Rajawali
- Saragih, Bintang R, 1988. *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Gaya media Pratama
- Sastroatmodjo, Sudijono, 1995. *Pelaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sembiring, Sentosa, 2006 *Himpunan Perundang-Undangan Republik Indonesia tentang Hak Asasi Manusia*, Bandung: Nuansa Aulia
- Soekanto, Soerjono. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Susanto, S. Astrid, Phil. 1999. *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Putra A Bardin
- Sugiyono, 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabetas
- Swantoro, FS. *Perilaku Pemilih*. [http:// www.suara merdeka.com/harian/ 0403/16/ nas 4.htm](http://www.suara merdeka.com/harian/0403/16/nas4.htm). (20 Maret 2011)
- Syafie, Kencana Inu, 1997. *Ilmu Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.